



## Analisis Framing Pemberitaan Kasus Obstruction of Justice Ferdy Sambo dalam Media Online Asing

**Muhammad Ghozy Al Fatah**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
ghozyalfatah47@gmail.com

**Fahmy Irfanuddin**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
ahmyirfan@gmail.com

**Abstract:** *This research aims to reveal or understand the frame built by foreign media regarding the reporting of the Obstruction of Justice case involving Inspector General Ferdy Sambo and how these frames were built, using Robert N. Entman's analysis technique. Media as the fourth estate have a big influence in building the public perception of an event. The increasing development of information technology certainly increases the possibility of forming public opinion through digital-based media which possess a greater level of flexibility and accessibility than conventional media. The Obstruction of Justice case is important to research considering the popularity of this case for several months and how this case is an illustration of the upholding of justice in Indonesia. The research used a descriptive qualitative approach and referred to the framing analysis technique formulated by Robert Entman by focusing on four analysis aspects to reveal the frames constructed by media. The research revealed that the frame built by foreign online media was in the form of a narrative of the National Police as an institution with problems internally and externally, and the Obstruction of Justice case as well as a series of problems that followed were the result of problems within the National Police. In this case, foreign online media emphasized the issue of a culture of impunity as the cause of obstruction of law enforcement in Indonesia which seemed sharp upwards but blunt downwards.*

**Keywords:** Framing Analysis, Obstruction of Justice, Ferdy Sambo, Foreign Online Media

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap atau mengetahui frame yang dibangun oleh media asing terhadap pemberitaan kasus Obstruction of Justice yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo serta bagaimana frame tersebut dibangun, menggunakan teknik analisis Robert N. Entman. Media sebagai the fourth estate memiliki pengaruh yang besar dalam membangun persepsi publik atas suatu peristiwa. Semakin berkembangnya teknologi informasi tentu memperbesar kemungkinan atas terbentuknya opini publik melalui media berbasis digital yang dari memiliki tingkat fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar dari media konvensional. Kasus Obstruction of Justice menjadi penting diteliti mengingat populernya kasus ini selama beberapa bulan lamanya serta bagaimana kasus ini menjadi gambaran akan penegakan keadilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta mengacu pada teknik analisis framing yang dirumuskan oleh Robert Entman dengan berfokus kepada empat aspek analisis untuk dapat mengungkap frame yang dibangun oleh suatu media. Temuan*



penelitian berupa *frame* yang dibangun oleh media online asing berupa narasi Polri sebagai institusi bermasalah secara internal maupun eksternal dan kasus *Obstruction of Justice* serta sederet permasalahan yang menyertainya, merupakan buah dari permasalahan di tubuh Polri. Dalam hal ini media online asing menonjolkan isu budaya impunitas (*culture of impunity*) sebagai penyebab terhalangnya penegakan hukum di Indonesia yang terkesan tajam ke atas namun tumpul ke bawah.

**Kata kunci:** Analisis Framing, *Obstruction of Justice*, Ferdy Sambo, Media Online Asing

## Pendahuluan

Media massa terutama yang berbasis online merupakan sebuah kekuatan yang sangat diperhitungkan keberadaannya saat ini. Arnold seperti yang dikutip oleh Palloshi<sup>1</sup> menyebutkan bahwa media telah menjelma menjadi apa yang disebut sebagai “*virtual state*” yang mampu mempengaruhi stabilitas sebuah negara (*traditional state*) untuk mengatur tensi sebuah konflik dengan cara menawarkan berbagai perspektif serta membangun opini publik. Selain itu, media juga memiliki kemampuan dalam memilah serta memilih berbagai isu di tengah publik dan menjangkit perhatian yang besar dari khalayak untuk kemudian bersikap atau bertindak sesuai dengan penafsiran publik atas informasi tertentu. Hal ini kemudian mampu mempengaruhi para pemangku kebijakan sekalipun dalam hal ini pemerintah yang merasa tidak nyaman dan semakin terdesak apabila tidak segera mengambil tindakan atas isu yang tersebar di tengah publik<sup>2</sup>

Kemampuan media dalam membangun opini publik serta mempengaruhi pengambilan kebijakan (*policy making*) menjadi suatu hal yang diperhitungkan oleh pemerintah. Cara media mempengaruhi pengambilan kebijakan bukan dengan terlibat secara langsung, melainkan dengan cara membangun *frames* mengenai sebuah isu yang kemudian membuat publik mempertanyakan kredibilitas pemerintah untuk kemudian mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan<sup>3</sup>

Pemberitaan mengenai kasus pembunuhan berencana oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo, menjadi salah satu contoh akan bagaimana media

---

<sup>1</sup> (2015)

<sup>2</sup> (Palloshi, 2015).

<sup>3</sup> (Palloshi, 2015).



mampu mempengaruhi pemerintah dalam mengambil sebuah tindakan atas isu yang beredar di tengah publik. Pada 13 Februari 2023 lalu, publik dihebohkan dengan vonis hakim yang menjatuhkan pidana hukuman mati terhadap mantan perwira polisi Irjen Ferdy Sambo atas dakwaan keterlibatan dalam pembunuhan berencana. Keputusan tersebut datang setelah serangkaian proses sidang serta investigasi oleh tim khusus bentukan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) yang menilai pembunuhan yang menyebabkan tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau yang disingkat sebagai Brigadir J tersebut penuh dengan kejanggalan.

Laman media sosial serta cetak pun ramai dihiasi dengan *headline* pemberitaan tersebut. Spekulasi, opini, serta berbagai analisis bermunculan yang diantaranya menyorot Polri sebagai institusi yang telah tercoreng nama baiknya serta Ferdy Sambo dinilai telah melakukan tindakan *Abuse of Power* atau penyalahgunaan kekuasaan yang dalam kasus ini memanfaatkan statusnya sebagai Irjen polisi untuk bertindak semaunya tanpa memperhatikan lagi norma hukum yang berlaku.

Selain media dalam negeri, kasus ini juga menjadi sorotan media asing salah satunya *Al Jazeera*. Dalam rubriknya yang terbit pada 14 Februari 2023 tersebut, *Al Jazeera* menyebut kasus ini sebagai “*The Trial of The Century*” atau yang merupakan ungkapan idiomatik untuk menggambarkan besarnya kasus kriminal tertentu<sup>4</sup>.

Informasi berupa berita terkait Ferdy Sambo yang dikonsumsi publik tentunya sangat berpengaruh dalam membangun persepsi publik terhadap pribadi Ferdy maupun institusi Polri bahkan lembaga pemerintahan pada umumnya. Media massa sebagai kekuatan yang kerap disebut sebagai *the fourth estate* (kekuatan keempat) memiliki pengaruh yang signifikan dalam membangun persepsi publik. Hal ini cukup beralasan mengingat peran yang dapat dimainkan oleh media dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan sosial-politik serta ekonomi masyarakat.

---

<sup>4</sup> Aisyah Llewellyn, “Indonesia’s ‘Trial of the Century’ Ends in Death Sentence,” *Aljazeera.Com*, last modified February 14, 2023, accessed May 8, 2023, <https://www.aljazeera.com/news/2023/2/14/indonesias-trial-of-the-century-ends-in-death-sentence>.



Masih berbicara mengenai informasi, di era serba digital ini akses terhadap informasi semakin terbuka lebar. Hanya dengan sentuhan ujung jari telah mampu mengakses hingga ribuan informasi dengan perspektifnya yang sangat beragam. Gencarnya penyebarluasan berita serta karya jurnalistik lainnya melalui berbagai macam media sekali lagi membuktikan kuatnya media dalam upaya membangun persepsi masyarakat. Dan, penting pula untuk dicatat bahwa karya jurnalistik berupa berita media massa memiliki dampak (*effect*) yang signifikan terhadap reaksi masyarakat dan dengan demikian kehadirannya sangat diperhitungkan oleh para tokoh di negeri ini mengingat akan kuasa serta daya tariknya<sup>5</sup> Dengan kuasanya tersebut, media memainkan perannya dalam membentuk persepsi publik. Dalam membangun sebuah realitas, media massa bertumpu pada kekuatan bahasa media (teks berita). Norman Fairclough seperti yang dikutip dalam Eriyanto<sup>6</sup> berpendapat bahwa bahasa dapat dimaknai lebih dari sekedar teks, melainkan juga sebuah bentuk praktik kekuasaan yang secara sosial juga historis merupakan bentuk tindakan dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Melalui bahasa media inilah, para awak media mengkonstruksikan secara subjektif persepsi mereka atas suatu isu yang kemudian maknanya ditulis (dimaknai) oleh khalayak. Dalam pandangan ini benar dan salahnya sebuah realitas peristiwa dapat ditentukan dari sejauh mana media mengkonstruksikan realitas peristiwa dalam bahasa yang ditulisnya<sup>7</sup>.

Dalam menyusun sebuah berita, seorang jurnalis harus memperhatikan beberapa aspek yang membuat sebuah berita ideal, disamping targetnya dalam menarik jumlah pembaca, sebuah berita haruslah bersifat faktual, artinya berita harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dan bukan hasil rekayasa serta dilengkapi dengan data yang membuktikan kebenaran peristiwa. Selanjutnya berita haruslah aktual, yaitu bersifat *up to date* dengan memberitakan kejadian terkini yang masih hangat atau baru (*new*), selain itu sebuah berita tentunya harus informatif, artinya berita memiliki manfaat yang jelas bagi khalayak dan mampu membimbing para pembaca dalam membaca sebuah realitas akan peristiwa yang

---

<sup>5</sup> (Wazis, 2018: 2).

<sup>6</sup> (2011)

<sup>7</sup> (Wazis, 2018: 56)



terjadi di sekitar publik, dan yang tidak kalah penting, sebuah berita haruslah berimbang. Artinya, dalam menulis berita para jurnalis hendaknya bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak<sup>8</sup>.

Di era digitalisasi saat, prinsip jurnalisme berkembang dan tidak hanya berada di seputaran ranah 5W 1H. Paul Bradshaw seperti yang dikutip oleh Muzakir, merumuskan sebuah konsep jurnalisme modern yang dikenal sebagai BASIC. BASIC merupakan kependekan dari *Brevity*, *Adaptability*, *Scannability*, *Interactivity*, serta *Community and Conversation*. *Brevity* adalah keringkasan, artinya sebuah berita dituntut untuk bersifat ringkas dengan mempertimbangkan kesibukan setiap individu yang semakin tinggi. Lalu *Adaptability* yang berarti sebuah berita hendaknya mampu beradaptasi dengan menyesuaikan kebutuhan serta preferensi publik dan tingginya ranah digitalisasi di berbagai aspek. Maka dari itu seorang jurnalis hendaknya melek akan teknologi. Lalu *Scannability* yang berarti sebuah berita mampu diakses secara mudah oleh para khalayak, lalu *Interactivity* yang berarti keterlibatan para pembaca sangat penting di era ini mengingat hadirnya berbagai fitur yang memungkinkan para khalayak mengutarakan respon serta pendapat mereka terkait sebuah informasi. Terakhir, *Community and Conversation* yang berarti sebuah media haruslah komunikatif dalam berinteraksi dengan khalayak.

Selain memperhatikan kaidah penulisan serta kepekaan terhadap perkembangan teknologi, seorang jurnalis disebut profesional apabila mampu bertanggung jawab terhadap apa yang diberitakan. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan awak media dalam menjunjung tinggi nilai moralitas terutama kejujuran dalam melaksanakan kegiatan jurnalisme. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai moralitas dalam segala aspek kehidupan memiliki *concern* dalam mengarahkan umat manusia untuk senantiasa jujur dalam menyampaikan sesuatu terutama berita, Islam juga melalui Al Qur'an telah memberikan peringatan terhadap siapapun yang tidak jujur dalam menyampaikan suatu berita dan akan bertemu dengan sebuah konsekuensi yang berat yaitu dosa

---

<sup>8</sup> Irsyad Ridho, Muhammad Rois, and Dadi Ardiansyah, *Menjadi Jurnalis Milenial*, 1st ed. (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, 2021).



serta azab yang besar. Allah SWT berfirman, “*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar*”. (QS. An Nur: 11).

Dari sisi penerima berita atau informasi, Allah SWT dalam Al Qur’an memerintahkan setiap individu untuk melakukan *tabayyun* atau yang sering kita kenal sebagai *check and recheck* yaitu memeriksa kebenaran sebuah informasi. Allah SWT berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu*” (QS. Al Hujurat: 6).

Di era digitalisasi seperti saat ini, salah satu tantangan berat awak media adalah menyampaikan suatu berita apa adanya, tanpa tendensi, serta profesional. Terlepas dari syarat sebuah berita disebut ideal, pada kenyataannya di tengah publik banyak sekali terjadi bias media atau penyimpangan, manipulasi, serta distorsi, yang bersumber dari pandangan subjektif seorang jurnalis<sup>9</sup>. Berangkat dari cara media massa membangun persepsi akan realitas suatu peristiwa secara subjektif serta maknanya yang cukup beragam inilah yang membuat penulis tertantang untuk mengkaji perspektif berita yang diangkat oleh media massa melalui analisis *framing*. Alasan penulis memilih topik kasus pembunuhan berencana oleh Irjen Ferdy Sambo adalah mengingat betapa pentingnya kasus ini dalam dinamika perjalanan penegakan hukum di Indonesia serta bagaimana ia mampu membangun persepsi publik atas institusi pemerintahan terutama Polri, serta bagaimana kasus ini tetap menjadi perbincangan hangat dan masih bermunculan di banyak halaman media massa bahkan setelah beberapa bulan vonis hukuman mati dijatuhkan atas Ferdy Sambo.

---

<sup>9</sup> Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Semiotik, Dan Analisis “Framing”*.



Menjadikan media online sebagai kajian, menjadi pilihan bagi penulis dengan mempertimbangkan besarnya persentase pengguna internet di Indonesia yang hingga awal tahun 2023, data yang dirilis oleh Digital Report menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia telah menyentuh angka 212.9 juta pengguna dengan ponsel aktif sejumlah 353.8 juta buah yang mencakup 128.0 populasi warga Indonesia. Tentunya arus media online berikut informasinya sudah menjadi bagian dari keseharian publik Indonesia.

Adapun, memilih media online asing sebagai subjek penelitian dengan mempertimbangkan bahwa media online asing memiliki peran dalam membangun opini publik terutama publik internasional yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana media asing mampu mempengaruhi opini publik serta pengambilan kebijakan dijelaskan oleh teori *CNN effect*. *CNN effect* sendiri merupakan teori yang menyatakan bahwa pemberitaan media memang berpengaruh pada pengambilan kebijakan, atau adanya perlombaan secara *real time* dalam pemberitaan mengenai pengambilan keputusan oleh pemerintah. Hal ini seharusnya menjadi perhatian yang bagi pemerintah dalam menyadari penting serta berpengaruhnya pemberitaan media asing mengenai isu yang berlangsung di negaranya, terutama mengingat negara kita mempunyai hubungan bilateral dengan banyak negara di dunia.

Ide yang melatarbelakangi munculnya teori *CNN effect* adalah adanya komunikasi *real time* yang memungkinkan media massa untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan publik suatu pemerintahan. Livingston seperti yang dikutip oleh Palloshi<sup>10</sup> mendeskripsikan *CNN effect* sebagai bentuk “hilangnya kontrol” atas pengambilan kebijakan dikarenakan kuatnya pengaruh media. hal ini sebagai akibat dari penggambaran media akan krisis di suatu negara yang ditampilkan ke wajah publik dan tentunya seakan memaksa pihak terkait dalam hal ini pemerintah untuk segera mengambil keputusan cepat. *CNN Effect* merepresentasikan sebuah krisis sebagai tekanan publik atas penguasa yang mana mereka harus sesegera mungkin mengambil langkah yang rasional dan

---

<sup>10</sup> (2015)



profesional. Menurut Seib seperti yang dikutip oleh Palloshi <sup>11</sup> menyatakan bahwa *CNN Effect* menggambarkan ilustrasi berupa tensi yang ada diantara real-time media dan pengambilan kebijakan publik (*policy making*) dengan pemberitaan yang secara pengaruh mengalami kenaikan maupun penurunan. *CNN Effect* juga menjelaskan bahwa bahwa krisis yang ada mengakibatkan publik menuntut adanya respon segera atas krisis atau para pemangku kebijakan akan jatuh pada potensi menurunnya popularitas (*risk of unpopularity*).

Terkait korelasi media asing dengan pengambilan kebijakan, Taylor <sup>12</sup> menjelaskan bahwa sejak Perang Dunia I urusan peperangan pada saat itu tidak hanya menjadi *concern* dalam internal pemerintahan saja, tetapi juga media massa sebagai aktor dalam pembentukan opini publik. pada masa itu media tengah gencar menyiarkan tentang nasionalisme dan propaganda perang. Kemudian pada tahun 1990 perusahaan berita asal Amerika Serikat, *Cable News Network* (CNN) mulai gencar memberitakan isu *humanitarian crisis* di Somalia dan Bosnia, dari sinilah muncul istilah "*CNN Effect*" yang mencerminkan bahwa media memiliki pengaruh yang penting dalam pengambilan kebijakan, menjembatani hubungan suatu negara dengan negara lainnya, serta pembentukan opini publik internasional.

Dalam penelitian kali ini, penulis berusaha mengkaji empat teks berita dari empat laman media massa online berbasis internasional yang berbeda-beda. Penulis memilih berita terbitan *Al Jazeera*, *Asia Times*, *Vice News*, seta *The Strait Times* sebagai objek analisis. Meskipun merupakan media massa dengan target pembaca internasional, keempat media online tersebut memiliki narasi pemberitaan yang cukup menarik untuk dikaji dan sepantasnya dipahami oleh khalayak Indonesia. Keempat media online asing yang penulis pilih merupakan media yang telah memiliki reputasi global dengan koresponden dan bironya yang tersebar di seluruh penjuru dunia dan juga telah menjadi referensi dalam memahami isu global.

---

<sup>11</sup> (2015)

<sup>12</sup> Philip M Taylor, *Global Communications, International Affairs and The Media Since 1945*, 1st ed. (London: Routledge, 1997).



*Al Jazeera* merupakan media yang sudah tidak asing di telinga. Media yang dikenal cukup kritis dalam menyorot suatu peristiwa di berbagai penjuru dunia hingga saat ini memiliki sekitar 70 biro yang tersebar di berbagai negara termasuk Indonesia, serta lebih dari 3.000 karyawan yang berasal dari 95 negara. *Asia Times*, sebuah yang banyak menjadi rujukan mengenai isu di regional Asia, memiliki prospek pembaca yang cukup menjanjikan. sejak berekspansi menuju media digital pada Oktober 2016, *Asia Times* berhasil menarik minat 350.000 pembaca hanya dalam waktu 30 hari. Hingga saat ini, *Asia Times* memiliki 9 biro media yang tersebar di seluruh dunia. *Asia Times* juga mulai melakukan ekspansi ke berbagai bahasa Asia seperti Mandarin, Jepang, Korea, Arab, Tagalog, serta Bahasa Indonesia. Adapun *Vice News* dengan reputasinya sebagai media yang memiliki cara pandang kontroversial dalam menanggapi berbagai isu, mampu menghasilkan 2.400 artikel setiap minggunya yang diterjemahkan dalam 25 bahasa. Kemudian *The Strait Times*, salah satu media massa tertua di Asia, Hingga saat ini, *The Strait Times* memiliki beberapa biro yang tersebar di berbagai negara termasuk di Washington DC, Amerika Serikat, serta kontributor yang juga tersebar di berbagai penjuru dunia. *The Strait Times* banyak terfokus kepada pembahasan mengenai isu di regional Asia maupun penjuru dunia.

Untuk menjelaskan latar belakang permasalahan dari keempat berita tersebut, maka perlu dikaji terlebih dahulu aspek naratif dari keempatnya. Dalam penelitian kali ini peneliti mengkaji realitas pemberitaan media massa menggunakan teknik analisis *framing* model Robert Entman yang berfokus pada analisis empat aspek yaitu *Problem Identification* atau sebagai apa peristiwa dilihat, *Causal Interpretation* yang berfokus pada siapa penyebab masalah, *Treatment Recommendation* yang berarti saran penanggulangan masalah yang diusung oleh media, lalu *Moral Evaluation* atau penilaian atas penyebab masalah.

Penulis melalui tulisan ini mencoba menyampaikan betapa pentingnya memahami dengan utuh sebuah berita melalui pemahaman akan perspektif pemberitaan oleh media yang dengan demikian akan membuat



pembaca menjadi lebih cerdas dalam memahami sebuah kasus pemberitaan, serta bijak dalam menyimpulkan sebuah berita.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini berjenis analisis tekstual (*textual analysis*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Riset dilakukan dengan mengamati seleksi isu (*selection*) serta aspek penonjolan isu (*salience*) yang mana merupakan dua unsur yang membuat sebuah berita menjadi terlihat penting dan bernilai. Adapun data yang diambil berupa data primer yang berupa data tekstual dalam teks berita serta data sekunder yang berupa referensi tambahan dari berbagai sumber seperti buku dan artikel yang sesuai dengan relevansi topik penelitian.

No	Aspek Framing Robert Entman	Indikator
1	Seleksi Isu ( <i>selection</i> )	Berupa isu tertentu yang dimasukkan dalam berita.
2	Penonjolan ( <i>salience</i> )	Pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra tertentu yang ditampilkan kepada khalayak.

### Hasil dan Pembahasan

#### Teknik Analisis Framing Robert N. Entman

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konstruksi media online asing dalam melakukan *framing* terhadap pemberitaan kasus *obstruction of justice* Ferdy Sambo yang menjadi isu berskala nasional bahkan internasional. Teknik analisis yang digunakan merupakan teknik yang dirumuskan oleh Robert N. Entman yang memandang sebuah cara untuk mengungkap *the power of a communication text*. Menurutnya, *framing analysis* dapat menjelaskan dengan cara yang tepat mengenai pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh transfer informasi dari sebuah lokasi, seperti pidato, ucapan/ungkapan, *news*



report, atau sekalipun novel. Entman dalam merumuskan teknik analisis framing berfokus kepada empat aspek yaitu,

1. *Define Problems* memberikan penekanan akan bagaimana suatu masalah, peristiwa, maupun isu dipandang oleh wartawan. Dalam hal ini, wartawan bisa memiliki paham yang -beda dalam memandang suatu isu sehingga membentuk frame yang berbeda-beda pula <sup>13</sup>.
2. *Diagnose Causes* merupakan elemen yang berfungsi untuk mengetahui siapa (*who*) aktor (*causal agents*) yang ada di balik sebuah isu. Penafsiran yang berbeda-beda mengenai aktor juga sangat memungkinkan terjadi di tengah para awak media. Hal ini juga didasari oleh pemahaman yang berbeda pada tiap individu  
Click or tap here to enter text..
3. *Make Moral Judgment* digunakan untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah diidentifikasi sebelumnya <sup>14</sup>.
4. *Treatment Recommendation* merupakan elemen yang digunakan untuk mengidentifikasi saran yang dikehendaki wartawan dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini tentu sangat bergantung pada bagaimana wartawan memandang sebuah isu  
Click or tap here to enter text..

#### Artikel Pemberitaan Media Online Asing Mengenai Kasus *Obstruction of Justice*

Al Jazeera	Asia Times
“Indonesia’s ‘Trial of The Century’ ends in death sentence” 14 Februari 2023	“Sex, lies and death to a top cop in Indonesia” 14 Februari 2023

<sup>13</sup> (Eriyanto, 2011: 225)

<sup>14</sup> (Eriyanto, 2011: 226)



Vice News	The Straits Times
“Disgraced Ex-Police General Sentenced to Death For Ordering Officer’s Murder” 14 Februari 2023	“Indonesian ex-senior cop gets death sentence for murder of his bodyguard in high-profile scandal” 13 Februari 2023

Hasil Perbandingan Analisis *Framing* Keempat Media Online Asing

*Perbandingan aspek define problems*

Al Jazeera	Asia Times
Reputasi institusi kepolisian secara khusus dan mekanisme penegakan hukum di Indonesia tercoreng akibat kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo beserta anak buahnya.	Proses penyidikan kasus <i>Obstruction of Justice</i> Ferdy Sambo dinilai kurang transparan dan banyak menyisakan pertanyaan di tengah publik.
Vice News	The Straits Times
Pihak kepolisian dengan budaya impunitas menjadi penghalang atas penegakan hukum di Indonesia	Terhalangnya proses penegakan hukum akibat adanya budaya impunitas dalam tubuh Polri



*Perbandingan aspek diagnose causes*

Al Jazeera	Asia Times
Penyalahgunaan wewenang ( <i>abuse of trust</i> ) oleh Ferdy Sambo sebagai seorang perwira kepolisian.	Pihak kepolisian yang dinilai kurang transparan dalam melakukan penyelidikan.
Vice News	The Straits Times
Institusi Kepolisian dengan budaya Impunitasnya .	<i>Obstruction of Justice</i> sebagai sebuah bentuk dari budaya impunitas.

*Perbandingan aspek make moral judgment*

Al Jazeera	Asia Times
Sistem penegakan hukum di Indonesia terkesan simpang – siur serta terhalang oleh sebuah budaya yang menghalangi penegakan hukum yaitu budaya impunitas ( <i>impunity culture</i> )	Terdapat skandal dalam tubuh internal kepolisian.
Vice News	The Straits Times



Institusi kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang semakin menurun kredibilitas serta reputasinya akibat adanya impunitas. .	Kepercayaan publik akan institusi kepolisian merupakan konsekuensi dari tindakan kesewenang-wenangan aparat
---	---

*Perbandingan treatment recommendation*

Al Jazeera	Asia Times
Menjadikan kasus Ferdy Sambo serta beberapa kasus yang mencoreng nama baik kepolisian sebagai evaluasi dan melakukan reformasi besar-besaran di tubuh Polri.	(penulis tidak menemukan saran ataupun solusi yang ditawarkan oleh Asia Times)
Vice News	The Straits Times
Evaluasi atas budaya impunitas sebagai langkah untuk melakukan reformasi dalam tubuh institusi.	Reformasi serta usaha untuk membangun “ <i>better governance</i> ”.

**Diskusi**

Setelah melakukan analisis *framing* terhadap artikel keempat media online serta melakukan perbandingan hasil temuan, penulis menyimpulkan bahwa mayoritas dari keempat media menyoroiti isu yang sama yaitu budaya impunitas (*culture of impunity*) atau yang sering dikenal sebagai “kekebalan hukum”. Tiga media online (terkecuali Asia Times yang lebih menyoroiti isu transparansi penyelidikan), baik Al Jazeera, Vice News, serta The Straits Times memiliki porsi



pembahasan atas *culture of impunity* yang cukup dominan dalam narasinya. Penonjolan isu seperti yang dijelaskan oleh Entman<sup>15</sup>, merupakan salah satu cara kerja *framing* agar sebuah teks yang dalam kasus ini berita, bisa bernilai dan penting di mata khalayak.

Budaya impunitas dalam penegakan hukum di Indonesia telah menjadi sorotan para peneliti maupun pemerhati HAM terutama dari luar negeri. Penelitian yang dilaksanakan oleh Pohlman<sup>16</sup> asal The University of Queensland mendefinisikan budaya impunitas di Indonesia sebagai sebuah bentuk “kegagalan proses reformasi” terhitung sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 yang banyak diharapkan oleh masyarakat sebagai sebuah angin segar bagi proses demokratisasi di Indonesia. Pohlman menjelaskan bahwa budaya impunitas memungkinkan beberapa pihak dalam hal ini pihak yang memiliki posisi sebagai penegak hukum untuk berbuat sewenang-wenang dan tidak dapat diadili disaat pihaknya sendiri melakukan suatu tindakan melawan hukum. Pohlman juga menuliskan bahwa kurangnya akuntabilitas dari para penegak hukum merupakan penyebab dari makin subur budaya impunitas di tengah oknum penegak hukum, hal yang sama seperti yang dituliskan Al Jazeera dalam artikelnya dengan menyinggung aspek “*lack of accountability*” di antara anggota Polri. Jaffrey<sup>17</sup> asal The University of Chicago dalam disertasinya mengaitkan budaya impunitas di Indonesia dengan tindakan vigilantisme atau normalisasi kekerasan. Jaffrey menyebutkan budaya impunitas tumbuh subur di tengah banyak negara berkembang dengan kehidupan demokrasi yang rapuh seperti Indonesia, Brazil, dan beberapa negara Asia Tenggara, Timur Tengah, serta Amerika Latin. Budaya impunitas menurutnya disebabkan oleh jauhnya kehadiran negara dari masyarakat serta institusi negara yang disetir oleh banyak kepentingan (*interests*). Dalam tulisannya, Jaffrey juga menjelaskan proses terjadinya vigilantisme sebagai buah dari kesewenang-wenangan para pemangku kebijakan struktural dalam memberikan perintah kepada bawahan (*street police levelman*) untuk melaksanakan perintah yang jika tidak dilaksanakan akan menyebabkan beberapa

---

<sup>15</sup> (1993)

<sup>16</sup> (2010)

<sup>17</sup> (2019)



konsekuensi dalam karirnya sebagai penegak hukum. Hal ini sesuai dengan deskripsi atas personal Ferdy Sambo yang dituliskan oleh Asia Times dalam artikelnya sebagai sosok yang punya posisi kuat diantara anggota Polri, ditakuti, dan jarang sekali perintahnya tidak dipatuhi.

Penulis dalam hal ini menerjemahkan narasi budaya impunitas yang dibangun oleh ketiga media sebagai sebuah bentuk “keraguan” atas proses penegakan hukum kasus *obstruction of justice* Ferdy Sambo. Dari narasi yang disajikan dapat dipahami bahwa penegakan hukum di Indonesia terutama atas pihak institusi penegak hukum akan selalu diwarnai dengan kesimpangsiuran, rekayasa, serta tendensi kepentingan pihak tertentu selama budaya impunitas masih tumbuh subur diantara para penegak hukum.

Narasi budaya impunitas yang dibangun, juga bisa diartikan sebagai upaya media dalam membangun persepsi di tengah publik akan institusi pemerintahan yang bermasalah. Media massa memiliki posisi yang kuat dalam membangun opini publik mengenai hukum serta kriminal di sekitar masyarakat. Perkembangan teknologi juga semakin memperkuat posisi media massa dalam membangun konstruksi realitas di tengah publik. Menurut Aleem dkk<sup>18</sup>, cara media membangun persepsi di tengah publik atas tindakan kriminal dan hukum adalah salah satunya dengan membangun *image* sistem penegakan hukum sebagai sebuah sistem yang gagal (*faulty system*) dan bahwasanya *image* sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh pendapat masyarakat berlandaskan pada pengalaman pribadi. Apabila masyarakat merasakan ketidakadilan, maka media massa akan berdiri di pihak masyarakat dan menjadi penyampai keluh kesah serta pandangan masyarakat atas sistem yang bermasalah, meskipun tidak sedikit juga media yang memanfaatkan kondisi seperti ini hanya untuk meraup *viewers* dan menjadikannya sebagai ajang kompetisi dengan media massa lain.

Vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo sendiri telah dibatalkan dan digantikan dengan hukuman seumur hidup melalui keputusan hakim Mahkamah Agung (MA) pada 8 Agustus 2023 kemarin. Keputusan hakim juga memberikan

---

<sup>18</sup> (2021)



keringanan hukuman kepada tersangka lainnya seperti istri Sambo Putri Chandrawati, sopir pribadi Kwat Ma'ruf, serta Ricky Rizal. Keputusan MA ini dianggap kontroversial dan menuai berbagai kritik terutama dari para pemerhati hukum di tanah air. Azmi Syahputra, pakar hukum dari Universitas Trisakti menyatakan bahwa pembatalan vonis hukuman mati atas Ferdy Sambo merupakan hal yang berpotensi memantik kekecewaan di tengah publik terutama keluarga korban akan pengadilan tinggi serta pengadilan negeri. Tentunya hal ini sangat dipengaruhi oleh kualitas keputusan yang diambil oleh hakim<sup>19</sup>.

Penulis dalam hal ini belum menemukan artikel yang diterbitkan oleh Al Jazeera, Vice News, The Straits Times, serta Asia Times yang berisi tanggapan mengenai pembatalan vonis hukuman mati atas Ferdy Sambo ini. Akan tetapi di sisi lain, penulis menemukan artikel yang ditulis oleh Llewelyn Aisyah, kontributor yang menulis untuk Al Jazeera pada artikel yang penulis teliti. Melalui South China Morning Post (SCMP) dengan judul "*Indonesians riled after top cop escapes death penalty for murder of bodyguard, but activists say he has 'right to live'*", Llewellyn menyatakan bahwa pembatalan hukuman mati atas Ferdy Sambo merupakan sebuah keputusan yang berpotensi menimbulkan pertanyaan akan transparansi serta ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum yang mengadili mantan kepala Kadiv Propam tersebut.

Llewellyn dalam tulisannya tetap mempertahankan pendapat atas adanya budaya impunitas serta kurangnya akuntabilitas di dalam tubuh institusi penegak hukum di Indonesia, seperti halnya yang dituliskan di Al Jazeera.

## Simpulan

Melalui hasil analisis *framing* Robert Entman, penulis dapat menyimpulkan pandangan keempat media atas kasus *obstruction of justice*. Permasalahan yang timbul akibat *obstruction of justice* seperti penodaan reputasi Polri serta penurunan *public trust* atas institusi penegakan hukum semuanya

---

<sup>19</sup> CNN Indonesia, "Mempertanyakan Alasan MA Beri Diskon Vonis Sambo Cs," last modified August 9, 2023, accessed August 23, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230809095957-12-983751/mempertanyakan-alasan-ma-beri-diskon-vonis-sambo-cs>.



dibingkai dalam sebuah *frame* atas Polri sebagai sebuah institusi hukum yang bermasalah secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini, Polri merupakan *causal agent* atau dalang dibalik permasalahan yang menyertai kasus *obstruction of justice* yang melibatkan Ferdy Sambo ini.

Mayoritas media membangun *frame* dengan cara menonjolkan isu budaya impunitas dalam menggambarkan kekacauan dalam tubuh institusi Polri terkecuali Asia Times yang lebih menonjolkan isu transparansi penyidikan atas kasus *obstruction of justice*. Penulis menemukan bahwa keempat media mencoba membangun persepsi di tengah khalayak bahwasannya institusi penegak hukum dalam hal ini Polri merupakan suatu lembaga yang memiliki permasalahan serius yang dalam hal ini mayoritas media setuju atas adanya budaya impunitas dalam tubuh institusi dan merupakan suatu penghalang atas penegakan keadilan di Indonesia yang terkesan “tajam ke bawah namun tumpul ke atas”.

Penulis juga menerjemahkan narasi yang dibangun oleh keempat media sebagai sebuah bentuk “ketidakpercayaan” serta “keraguan” media akan proses peradilan serta penegakan hukum atas Ferdy Sambo yang berakhir dengan batalnya vonis hukuman mati atas terdakwa pada 8 Agustus 2023 lalu.



## Daftar Pustaka

- Aleem, Yasir, Sanan Waheed Khan, and Saima Jamroze. "Media's Portrayal of Crime and Public Perception Toward the Criminal Justice System." *Bulletin of Business and Economics* 10, no. 4 (2021): 167–175.
- CNN Indonesia. "Mempertanyakan Alasan MA Beri Diskon Vonis Sambo Cs." Last modified August 9, 2023. Accessed August 23, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230809095957-12-983751/mempertanyakan-alasan-ma-beri-diskon-vonis-sambo-cs>.
- Entman, Robert M. *Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm*. *Journal of Communication*. Vol. 43, 1993.
- Eriyanto. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*. 6th ed. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2011.
- Irsyad Ridho, Muhammad Rois, and Dadi Ardiansyah. *Menjadi Jurnalis Milenial*. 1st ed. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, 2021.
- Jaffrey, Sana. *The University of Chicago Leveraging the Leviathan: Politics of Impunity and the Rise of Vigilantism in Democratic Indonesia a Dissertation Submitted to the Faculty of the Division of The Social Sciences in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy Department of Political Science*, 2019.
- Llewellyn, Aisyah. "Indonesia's 'Trial of the Century' Ends in Death Sentence." *Aljazeera.Com*. Last modified February 14, 2023. Accessed May 8, 2023. <https://www.aljazeera.com/news/2023/2/14/indonesias-trial-of-the-century-ends-in-death-sentence>.
- Muzakir. *Etika Jurnalis: Analisis Kritis Terhadap Pemberitaan Media*. 1st ed. Jakarta: KENCANA, 2020.
- Palloshi, Shqipe. *The Influence of the CNN Effect and the Al Jazeera Effect on American Foreign Policy*, 2015.
- . *The Influence of the CNN Effect and the Al Jazeera Effect on American Foreign Policy*, n.d.
- Pohlman, Annie. *Preventing Future Mass Atrocities in Indonesia: Implementing the Responsibility to Protect Within A Culture of Impunity The Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect*, 2010.



Sobur, Alex. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Semiotik, Dan Analisis "Framing"*. 8th ed. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2018.

Taylor, Philip M. *Global Communications, International Affairs and The Media Since 1945*. 1st ed. London: Routledge, 1997.

Wazis, Kun. *Konstruksi Realitas Media Massa: Studi Fenomenologi Awak Redaksi*. 1st ed. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.